



Executive Summary

SURVEI
PERILAKU PEMILIH
DAN
LINKAGE POLITIK



The Asia Foundation



JIPPP

JURUSAN POLITIK &
Pemerintahan
FISIPOL UGM

Daftar Isi

Pengantar ●	I
Metode Penelitian ●	I
Teori Perilaku Politik dan Linkage Politik ●	3
Profil Kota Yogyakarta dan Kabupaten Magelang ●	6
Catatan Penutup ●	16
Daftar Pustaka ●	17



The Asia Foundation



JIP
JURUSAN POLITIK &
PEMERINTAHAN
FISIPOL UGM

SURVEI PERILAKU PEMILIH DAN *LINKAGE* POLITIK

A

Pengantar

Survei “Perilaku Pemilih dan *Political Linkage* di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Magelang” ini merupakan rangkaian program **MENINGKATKAN RASIONALITAS PEMILIH (II) Utilisasi *Political Tracking* Sebagai Instrumen Pendidikan Pemilih dan Penguatan Engagement antara Politisi dan Konstituen** kerjasama Research Center for Politics and Government (PolGov) Jurusan Politik dan Pemerintahan, FISIPOL UGM bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF). Kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk peningkatan kapasitas *political tracking* bagi pemilih perempuan, marjinal dan difabel sebagai instrumen audit social. Tiga kelompok tersebut merupakan kelompok marginal yang sering diabaikan dalam proses politik. Untuk mendapatkan data terkait program tersebut maka dilakukan penelitian menggunakan instrumen survei yang berisi mengenai tiga hal, yaitu perilaku pemilih, isu pembangunan dan *political linkage*. Tetapi untuk menambah perspektif *political tracking* dimasyarakat, dalam survei ini kami menambahkan kelompok umum yang berada diluar tiga kelompok tersebut sebagai informan.

Meningkatkan Rasionalitas Pemilih tidak bisa hanya dilakukan satu kali, tetapi perlu beberapa tahap. Pada tahap sebelumnya kami telah membuat Kartu Kontrol (KaTrol) untuk membantu pemilih menakar calon pilihannya dan tahap kedua adalah melalui survei. Sedangkan dari sudut pandang kami, KaTrol menjadi alat untuk melihat sejauh mana rasionalitas pemilih yang ada. Kedua tahap tersebut (KaTrol dan survei) dapat membantu kami menciptakan instrumen kontrol yang dapat diakses oleh publik, pemahaman mengenai *political tracking* serta inisiasi dialog antara politisi dan konstituen.

B

Metode Penelitian

Dalam kegiatan survei Perilaku Pemilih dan *Political Linkage* di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Magelang ini, kami menggunakan metode penelitian kuantitatif. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam riset ini adalah melalui metode survei. Kata ‘survei’ sendiri sering didefinisikan sebagai suatu metode yang menjelaskan tentang sekumpulan/sekelompok informasi sampel yang diambil dari masyarakat. Sampel atau informan diambil dari sekumpulan populasi dengan cara lewat telfon, surat, surat elektronik (email), bahkan secara *face to face* atau wawancara, menemui langsung informan yang diinginkan.

Dalam penelitian ini, kami menggunakan teknik kuota sampling dalam menentukan sampel. Teknik sampling ini dilakukan dengan atas dasar jumlah atau jatah yang telah ditentukan. Biasanya yang dijadikan sample penelitian adalah subjek yang mudah ditemui sehingga memudahkan pula proses pengumpulan data¹. Hal ini menjadi pertimbangan dalam survei ini terkait dengan keterbatasan data responden dari kelompok yang menjadi responden, dalam hal ini terjadi di kelompok difabel, perempuan, buruh maupun kelompok umum. Sehingga untuk lebih memudahkan dalam pengambilan sampel ini dilakukan dengan kuota sampling.

Singkatnya, metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini karena terkait dengan tema yang mendasari survei ini yaitu mengenai pemilu, kami berusaha untuk sebisa mungkin mengetahui respon publik terhadap pemilu secara luas dan dalam jangka waktu yang tidak jauh dari momentum pemilu tahun 2014. Atas dasar hal tersebut maka kami memutuskan untuk menggunakan metode penelitian survei agar dapat menghasilkan data secara cepat dan juga mencakup banyak responden. Harapannya dalam pelaksanaan survei didapatkan temuan yang merupakan pendapat banyak orang sehingga memudahkan dalam penjelasan kesimpulan hasil survei ini.

Survei ini dilakukan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Magelang pada tanggal 15–23 Juli Agustus 2014. Informan survei ini terdiri dari empat kelompok, yakni kelompok perempuan, kelompok difabel, kelompok buruh, dan masyarakat umum diluar ketiga kelompok diatas. Total keseluruhan responden adalah 305 responden. Dengan Rincian sebagai berikut:

Kelompok	Target Jumlah Responden per Daerah	Data Diolah: Kota Yogyakarta	Data Diolah: Kab. Magelang
Difabel	35	34	33
Perempuan	35	35	36
Buruh	35	35	41
Umum	45	46	45
JUMLAH	150	155	150

Pengambilan data dilakukan dengan bantuan enumerator (surveyor) sebanyak 24 orang, 12 orang di Kota Yogyakarta dan 12 lainnya di Kabupaten Magelang. Teknis pengumpulan data adalah metode wawancara, jadi enumerator membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada didalam kuesioner, kemudian informan menjawab dan enumerator mengisikan jawabannya kedalam kuesioner. Enumerator disini tidak hanya sebagai surveyor, tetapi juga sebagai asisten peneliti yang bertugas membantu menjelaskan pertanyaan dikuesioner kepada informan. Karena dalam proses pengumpulan data survei, tidak jarang ada informan yang kurang atau tidak dapat menangkap maksud pertanyaan yang ada dikuesioner. Proses analisis survei ini dilakukan menggunakan SPSS, yakni untuk mencari frekuensi, *crosstab* antar pertanyaan, hingga untuk memvalidasi data. Selanjutnya, hasil dari SPSS ini dijabarkan lebih lanjut menggunakan perspektif yang kita gunakan, yakni *Political Linkage*.

¹ Djarwanto, 1994, *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, Yogyakarta : Liberty.

Teori Perilaku Politik dan Linkage Politik

Teori Perilaku Politik

Perilaku politik seseorang tidak terlepas dari perilaku-perilaku lain maupun keadaan yang ada disekitarnya². Dalam konteks masyarakat yang majemuk atau plural seperti Indonesia, perilaku politik individu akan sangat dipengaruhi oleh produksi faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologi, sejarah, politik, budaya maupun geo-politik dimana individu dalam suatu masyarakat tersebut berada.

Ada tiga pendekatan untuk melihat perilaku politik seseorang³. **Pertama, Pendekatan Sosiologis.** Pendekatan sosiologis disebut juga model perilaku memilih Mazhab Columbia (The Columbia School of Electoral Behaviour). Yang menjadi asumsi dasar pendekatan ini yakni bahwa karakteristik sosiologis dan pengelompokan sosial seperti umur, jenis kelamin, agama, kelas/status sosial, okupasi, latar belakang keluarga akan berpengaruh signifikan terhadap pembentukan perilaku memilih. Pengelompokan sosial memiliki andil yang besar dalam membentuk, sikap, persepsi dan orientasi individu. Dengan kata lain pendekatan ini mencoba memahami pengaruh proses yang terjadi di sisi luar kedirian seseorang (pemilih) terhadap sikap preferensi politiknya. Paralel dengan hal tersebut, kaum sosiologis ini mengatakan bahwa keberadaan faktor lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi, etnis, tradisional keluarga, keanggotaan terhadap yang lain, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal merupakan berbagai hal yang turut mempengaruhi perilaku memilih⁴.

Kedua, Pendekatan Psikologis. Pendekatan ini dikembangkan di Amerika Serikat melalui Survey Research Centre Michigan University, dan dipelopori oleh August Campbell. Sehingga pendekatan ini disebut juga sebagai Mazhab Michigan. Model ini mencoba untuk menjawab kelemahan model pendekatan sosiologis yang sulit mengukur secara tepat indikator kelas sosial, tingkat pendidikan dan agama. Sehingga pendekatan ini mencoba menjelaskan aspek psikologis seseorang yang memberikan pengaruh kepadanya didalam menentukan pilihan politik seseorang. Menurut pendekatan ini, ada tiga hal yang sangat mempengaruhi perilaku memilih, yaitu (1) informasi politik yang diperoleh terkait dengan informasi kepentingan umum maupun kegiatan politik (seperti kampanye atau berita politik yang ada di media massa), (2) ketertarikan terhadap politik, dan (3) identitas partai atau *Party ID* yang terkait dengan perasaan dekat, sikap mendukung/setia atau identifikasi diri dengan partai politik tertentu.

Lebih jauh, pendekatan ini juga menempatkan pengaruh signifikan dari dalam diri pemilih yakni peta kognisi tentang realitas sosial politik (bagaimana pemilih memiliki gambaran mengenai dunia politik di sekitarnya). Peta kognisi ini meliputi: **pertama**, persepsi yaitu berbagai informasi mengenai apa yang diterima seseorang akan mempengaruhi sebagian besar apa yang ingin mereka terima. **Kedua**, konseptualisasi yaitu bagaimana seseorang mengambil sebuah sinyal politik, bagaimana mereka menentukan rasa terhadap apa yang mereka terima. Dengan kata lain bagaimana mereka mengkonsepsikan realitas politik. Aspek-aspek seperti perasaan, pengalaman dan interpretasi dari kejadian-kejadian politik juga secara signifikan mempengaruhi perilaku politik seseorang⁵.

² Sudijono Sastroatmodjo, 1995.

³ Carmines & Huckfeldt, 1996.

⁴ J. Kristiadi, 2004.

⁵ J. Kristiadi, 2004.

Ketiga, Pendekatan Ekonomis (Model Rational Choice). Perbedaan pendekatan rasional dengan pendekatan psikologis adalah bahwa perilaku pemilih yang rasional-responsif tidak permanen tetapi berubah-ubah seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan peristiwa politik⁶. Pendekatan ini menjelaskan sikap memilih masyarakat lebih didorong oleh kepentingan-kepentingan riil mereka, terutama yang menyangkut kepentingan material dan kesejahteraan. Pendekatan ini melihat perilaku memilih didasarkan pada kalkulasi untung-rugi⁷. Mana yang menguntungkan, mampu memenuhi kepentingannya dan memberikan kemanfaatan yang besar kepada individu, tentu saja akan dipilih. Oleh karena itu, pemilih akan berhati-hati dan menggunakan rasionalitasnya dalam memilih. Pendekatan ini berguna untuk mengetahui sejauh mana sikap masyarakat sudah mengarah pada sikap pilihan yang rasional. Wujud konkretnya misalnya adalah dengan melakukan kontrak politik terhadap kandidat. Atau dengan melihat apakah kinerja partai/anggota legislatif pada periode sebelumnya secara ekonomi menguntungkan dirinya (bersifat retrospektif), dan menilai apakah kinerja partai/anggota legislatif dalam 5 tahun ke depan secara ekonomi akan menguntungkan dirinya (bersifat prospektif).

Pendekatan rasional ini terutama berkaitan dengan dua orientasi utama pemilih yaitu *pertama*, orientasi isu dan *kedua*, orientasi kandidat. Dalam menentukan apakah pemilih rasional atau tidak dapat dilacak dari kelima ciri yang dikonsepsikan oleh Nimmo, yaitu bahwa pemilih rasional⁸:

- 1) Dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif
- 2) Dapat membandingkan apakah sebuah alternatif lebih disukai, sama saja, atau lebih rendah dibandingkan dengan alternatif lain
- 3) Menyusun alternatif dengan cara transitif, yakni apabila A lebih disukai daripada B, dan B lebih baik daripada C, maka A lebih disukai daripada C
- 4) Memilih alternatif yang tingkat preferensinya lebih tinggi
- 5) Selalu mengambil keputusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif-alternatif yang sama

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa perilaku politik tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat setempat dimana individu tersebut berada. Ia bukan berada di ruang hampa. Ia banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor sehingga dalam memahami perilaku politik seseorang dapat digunakan beberapa pendekatan. Meskipun perilaku politik akan mudah secara konkret dilihat pada perilaku memilih ketika pemilu, namun dalam memahami sikap memilih tersebut tidak dapat dilihat dari satu kacamata saja. Ia harus dipahami dari berbagai sudut pandang karena perilaku memilih merupakan salah satu wujud perilaku politik individu terbentuk dari interaksi antar berbagai komponen seperti struktur sosial, politik, budaya dan ekonomi yang mempengaruhi komunitas dimana individu tersebut berada.

⁶ Adman Nursal, 2004.

⁷ Ramlan Surbakti, 1992.

⁸ Adman Nursal, 2004.

Linkage Politik dalam Demokrasi Representasi

Tautan politik (*political linkage*) dalam riset ini dimaknai sebagai jalinan yang menghubungkan anggota parlemen dengan konstituennya (pemilih/*voters*) yang bertujuan menghasilkan kebijakan publik. Dalam teori dasar demokrasi, adanya *linkage* dipahami sebagai pertautan antara partai politik dengan para pemilihnya (*voters*), kemudian antara parlemen (arena dimana kader partai politik bekerja) dengan *voters*. Konsep *linkage* seringkali dipakai dalam organisasi-organisasi politik (partai politik, kelompok kepentingan, gerakan sosial), dan perannya terhadap demokrasi, yakni bagaimana organisasi-organisasi tersebut bertindak sebagai intermediari antara pemerintah dan warga negara. Beragam definisi dasar yang coba dilabelkan terhadap konsep *linkage*. Menurut K. Aarts⁹, *linkage* diartikan sebagai berbagai jenis ikatan antara warga negara, organisasi sosial dan sistem politik. Dengan demikian, membicarakan *linkage* politik akan selalu terkait dengan 3 elemen dasar, yakni: (1) warga negara; (2) aktor/institusi intermediari; dan (3) *linkage* urusan publik¹⁰. Tiga elemen itu yang melekat dalam diskusi soal *linkage* politik.

Namun, dalam konteks demokrasi representasi tidaklah cukup *linkage* dipahami sebagaimana Key¹¹ mengartikannya, yakni bahwa pemerintah hanya butuh responsif terhadap opini publik. Lebih jauh, *linkage* politik dimaknai sebagai instrumen dimana pemimpin politik bertindak sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan permintaan dari publik dalam pembuatan kebijakan pemerintah¹². Guna memperjuangkan kebutuhan publik tersebut, pemimpin politik dapat memakai beberapa sarana/instrumen. Sarana tersebut selama ini telah dilakukan oleh organisasi intermediari yang berfungsi mengagregasi dan merepresentasikan opini publik kepada pemerintah. Ketiga organisasi intermediari tersebut adalah: (1) kelompok kepentingan dan kelompok penekan, (2) gerakan sosial baru; dan (3) partai politik¹³. Dan partai politik merupakan aktor yang menonjol dalam demokrasi representasi.

Dalam konteks demokrasi representatif, partai politik menyediakan beberapa jenis *linkage*. Menurut Clark¹⁴ sebagaimana ia konseptualisasikan dari Lawson¹⁵ dan Poguntke¹⁶, setidaknya ada tujuh jenis *linkage* politik yang disediakan oleh partai politik, yaitu:

1. *Linkage partisipatoris (participatory linkage)*, yakni ketika partai bertindak sebagai agensi dimana warga negara dapat berpartisipasi dalam politik.
2. *Linkage elektoral (electoral linkage)*, yakni ketika pemimpin partai mampu mengontrol beragam elemen dari proses elektoral.
3. *Policy responsive linkage*, yakni ketika partai bertindak sebagai agensi untuk meyakinkan bahwa pemerintahannya responsif terhadap rakyat/pemilih.
4. *Linkage klientistik (clientelistic linkage)*, yakni ketika partai bertindak sebagai chanel dalam pertukaran suara yang diberikan oleh pemilih.

⁹ 1995:227 dalam Clark 2003:4.

¹⁰ Tornquist, 2009.

¹¹ 1980.

¹² Luttbeg 1974:3 dalam Clark 2003:6.

¹³ Clark 2003:6-7.

¹⁴ 2003:10.

¹⁵ 1980; 1988.

¹⁶ 1998:2002.

5. Linkage langsung (*directive linkage*), *linkage* ini digunakan oleh mereka yang berada dalam *public office* untuk mengontrol perilaku warga.
6. Linkage organisasional (*organisational linkage*), yakni *linkage* yang didasarkan pada pertukaran antara elit partai dan elit organisasi yang terbukti mampu memobilisasi atau menarik dukungan organisasinya kepada partai politik.
7. Linkage representatif (*representative linkage*), yakni terkait dengan fungsi partai untuk melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan.

Selain tipologi *linkage* politik yang diidentifikasi oleh Alistair Clark¹⁷ dari perspektif kajian partai politik, Kitschelt¹⁸ mendiskusikan *linkage* politik sebagai pola hubungan antara seorang politisi dengan warga negara sebagai konstituennya. Ia mengidentifikasi tiga jenis *linkage* yakni: klientelistik, programmatik dan karismatik. **Pertama, *linkage* klientelistik.** Klientelisme merupakan salah satu jenis 'pertukaran' antara konstituen elektoral dengan politisi sebagai agen dalam iklim demokratik¹⁹. Sehingga, *linkage* klientelistik merupakan pola hubungan yang dibangun seorang politisi dengan warga yang diwakilinya melalui cara pemberian keuntungan material agar warga yang diwakilinya itu mau memberikan dukungan terhadapnya. Pola relasi keduanya kemudian menjadi patron (politisi) – klien (warga negara). **Kedua, *linkage* programmatik.** *Linkage* model ini terbentuk karena seorang politisi membangun pola relasi dengan konstituen berdasarkan program kebijakan yang menguntungkan semua warga negara, termasuk mereka yang tidak memilihnya. **Ketiga, *linkage* karismatik.** Dalam model *linkage* karismatik, pola relasi antara seorang politisi dengan konstituennya dibangun berdasarkan pada karisma personal politisi yang bersangkutan.

Profil Kota Yogyakarta dan Kabupaten Magelang

Profil Politik Kota Yogyakarta dan Kabupaten Magelang

Kota Yogyakarta dan Kabupaten Magelang memiliki karakteristik yang hampir sama. Tidak dipungkiri meskipun keduanya memiliki karakter budaya yang hampir sama, tetapi karakter masyarakat dan keadaan politik mereka berbeda. Hal ini membuat pelaksanaan pemilu di dua daerah tersebut menarik untuk dilihat. Berikut adalah tingkat partisipasi pemilih pada tahun 2009 dan 2014 kemarin.

¹⁷ 2003.

¹⁸ 2000.

¹⁹ Kitschelt 2007:7.

Tabel 2
Partisipasi Kota Yogyakarta dan Kabupaten Magelang
Pada Pemilu 2009 dan 2014

Tahun dan Kota	2009		2014	
	Kota Yogyakarta	Kab Magelang	Kota Yogyakarta	Kab Magelang
Tingkat Partisipasi	66,54% ²⁰	79,93 %	75,8% ²¹	82,6% ²²

Gencarnya sosialisasi anti golput terhadap kelompok pemilih perempuan, pemilih pemula, kelompok difabel, kelompok keagamaan dan kelompok rentan lainnya, serta batuan Relasi (Relawan Demokrasi) dari KPU diyakini menjadi faktor kunci meningkatnya partisipasi pemilih Kota Yogyakarta²³. Sedangkan di Kabupaten Magelang sendiri Adanya peningkatan partisipasi dalam pileg 2014 tersebut dikarenakan berbagai faktor diantaranya semakin banyaknya sosialisasi pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, pemberitaan media massa, dan semakin meningkatnya akses informasi pemilih. Peningkatan partisipasi pemilih ini juga diimbangi dengan kondusifnya suasana sebelum dan pasca pemilu, misalnya terkait dengan pelaksanaan kampanye yang berjalan damai dan tidak ditemukan adanya persoalan seperti bentrok dan tindakan kekerasan lainnya. Demikian pula pasca pemungutan suara dan penetapan hasil pemilu legislatif, dimana keadaan dapat dibilang cukup kondusif mengingat tidak adanya protes dan sebagainya.

Tabel 3
Banyaknya Anggota DPRD Kota Yogyakarta 2014-2019
Menurut Partai dan jenis Kelamin

No	Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Anggota Terpilih
1.	PDI Perjuangan	14	1	15
2.	Demokrat	1	0	1
3.	PAN	4	1	5
4.	PKS	4	0	4
5.	Golkar	3	2	5
6.	PPP	3	1	4
7.	Gerindra	0	5	5
8.	Partai Nasional Demokrat	1	0	1
Jumlah		30	10	40 orang

Sumber: KPU Kota Yogyakarta²⁴

²⁰ Dalam <http://kpu-jogjakota.go.id/download/arsip/gRAFIK%20PERSENTASE%20YG%20MENGUNAKAN%20HAK%20PILIH%20DAN%20TIDAK.pdf> diakses pada hari rabu tanggal 3 Septemebr 2014 pukul 9:13 WIB.

²¹ *Partisipasi Kota Yogya Terendah*, dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/node/279201> diakses pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 pukul 9:21 WIB.

²² Wardoyo, Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Magelang dalam <http://jogja.tribunnews.com/2014/04/22/partisipasi-pemilu-di-kabupaten-magelang-meningkat/>, diakses pada 2 September 2014, pukul 12.50 WIB.

²³ Farid B. Siswanto, Humas KPU DIY. Dalam *Partisipasi Kota Yogya Terendah*, dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/node/279201> diakses pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 pukul 9:29 WIB.

²⁴ <http://kpu-jogjakota.go.id/download/filelain/model%20eb%203%20dan%20eb%205.pdf> diakses pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 pukul 09.16 WIB.

Hasil pemilihan legislatif 2009 di Kota Yogyakarta dimenangkan oleh DPI Perjuangan (11 kursi) dan disusul oleh Partai Demokrat (10 kursi). Pada pemilu legislatif 2014 ini PDI Perjuangan kembali unggul dengan memperoleh 15 kursi, dan dibawahnya ada Partai Golkar dengan 5 kursi. Sedangkan Partai Demokrat merosot keposisi dua terbawah (1 kursi). Dari hasil pemilu legislatif tersebut kita dapat melihat bahwa PDI Perjuangan unggul dan semakin menancapkan taringnya di Kota Yogyakarta.

Sebenarnya Kota Yogyakarta sudah sejak lama dikenal sebagai basis kaum abangan-nasionalis. Fatchiati beragumen bahwa Kota Yogyakarta menjadi basis kaum abangan-nasionalis karena kedekatan sosio-politik masyarakat Yogyakarta pada ideologi nasionalis tidak lepas dari peran Keraton Yogyakarta sebagai patron kultural dan sosok yang cenderung mengedepankan paradigma nasionalisme dalam berkomunikasi politik kepada rakyat Yogyakarta. Hal tersebut ditunjukkan Sultan dengan bergabungnya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Republik Indonesia serta bantuan yang diberikan Sultan Hamengkubuwana IX dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia²⁵.

Hasil rekapitulasi pemilihan legislatif Kabupaten Magelang menggambarkan bahwa PDIP menjadi partai peraih suara terbanyak dengan perolehan sepuluh kursi DPRD. Kemudian disusul Gerindra dan PKB dengan perolehan masing-masing enam kursi DPRD. Hasil pemilu legislatif Kabupaten Magelang ini sebanyak 19 orang adalah anggota yang sudah terpilih menjadi DPRD periode sebelumnya dan 31 anggota lainnya adalah wajah baru. Sehingga komposisi anggota DPRD ini adalah lebih dari 60 persen merupakan anggota baru yang terpilih dalam pemilihan legislatif tahun 2014 ini²⁶.

Tabel 3
Data Anggota DPRD Kabupaten Magelang Terpilih Berdasarkan Partai Politik

No	Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah Anggota Terpilih
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	NASDEM	-	-	-
2.	PKB	8	1	9 orang
3.	PKS	3	-	3 orang
4.	PDIP	8	2	10 orang
5.	GOLKAR	6	-	6 orang
6.	GERINDRA	9	-	9 orang
7.	DEMOKRAT	1	2	3 orang
8.	PAN	5	-	5 orang
9.	PPP	3	2	5 orang
10.	HANURA	-	-	-
11.	PBB	-	-	-
12.	PKPI	-	-	-
Jumlah		43	7	50 orang

Sumber : KPU Kabupaten Magelang

²⁵ Fatchiati, Nurul "Geliat Santri Kota di Wilayah Abangan" dalam *Kompas*, Jakarta: Edisi 13 Maret 2009, Dalam Asgart, Sofian Munawar "Perilaku Pemilih di Kota Yogyakarta: Fenomena Pemilu 2004 dan 2009" diakses dari http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31811695/Perilaku_Pemilih_di_Kota_Yogyakarta_sofian_asgart-libre.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1409210326&Signature=xjlo2iHwSgpgFda%2FqCOXARF%2Faxl%3D pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 pukul 11:16 WIB.

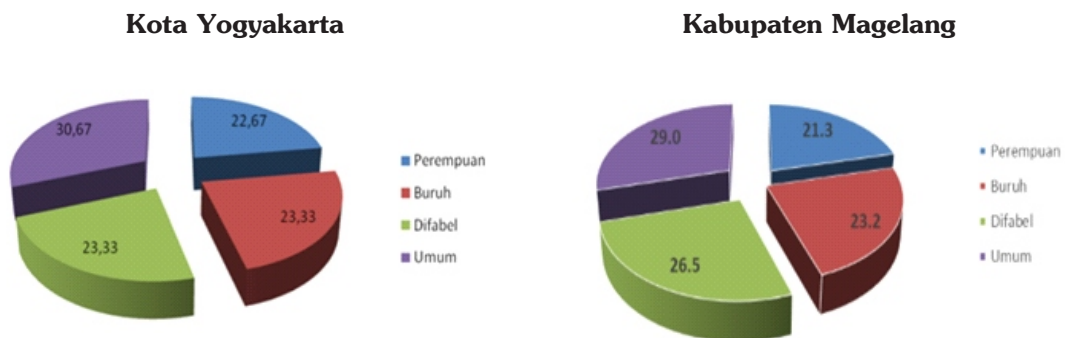
²⁶ Ariffudin, Ketua KPU Kabupaten Magelang, dalam <http://kpukabmagelang.com/hasil-pileg-2014>, diakses pada 2 September 2014, pukul 15.00 WIB.

Profil dan Karakter Responden Survei

Berdasarkan jenis kelamin responden di Kota Yogyakarta, lebih dari 50% adalah perempuan. Hal ini disebabkan karena dalam survei ini salah satu kelompok sasaran yang secara khusus menjadi targetnya adalah kaum perempuan, sehingga jika ditambah dengan responden dari kelompok umum, jumlah dan persentase responden yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada responden yang laki-laki (44,67%). Sementara jika kita menggunakan kriteria dalam UU Kepemudaan Nomor 40 tahun 2009²⁷, ternyata sebesar 18,67% responden termasuk pemuda. Kemudian jika didasarkan pada kriteria pemilih pemula²⁸, maka hanya sekitar 15% responden yang baru pertama kali menggunakan haknya dalam pemilu legislatif, artinya mayoritas responden sudah pernah mengalami pemilu, terlepas mereka menggunakan hak pilihnya atau tidak.

Apabila dilihat tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden, sebesar 44% berpendidikan rendah, yaitu berpendidikan SD dan SMP, atau bahkan tidak sekolah dan tidak tamat SD/SMP²⁹. Rendahnya tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden ini, sangat terkait dengan profil responden yang sebesar 23,33% merupakan kelompok buruh, dan sisanya sekitar 20,67% tersebar di jenis pekerjaan lain. Dari sisi pekerjaan responden, ternyata yang berprofesi sebagai buruh sebesar 26,67%. Posisi terbanyak responden yang berasal dari buruh, karena survei ini secara purposive sengaja mengambil dari buruh sebagai kelompok sasaran. Ditambah lagi, di luar kelompok sasaran buruh, terdapat responden buruh yang berasal dari kelompok umum, yaitu sebesar 3,34%.

Bagan 1.
Profil Responden Berdasarkan Kelompok Sasaran



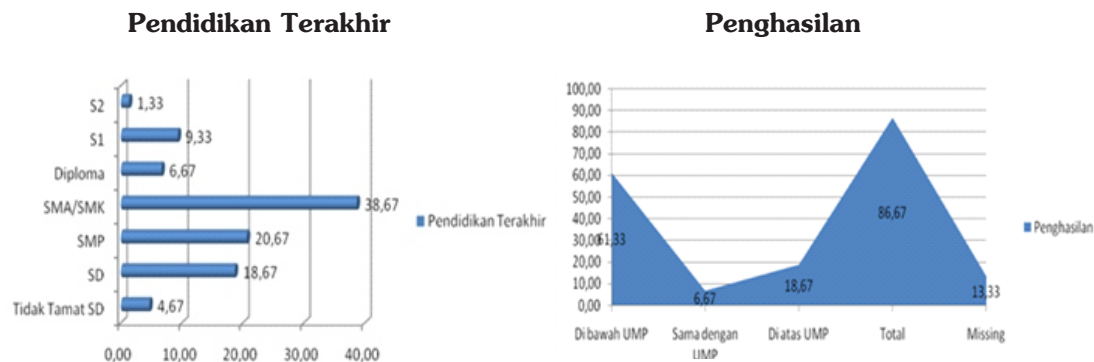
Sebagian besar pemilih yang menjadi responden, penghasilannya masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebesar Rp 988.500,-. Hal ini berkaitan dengan responden survei ini dari kelompok marginal yang pendidikan menengah rendah, sehingga akses untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang tinggi (di atas UMP) sangat terbatas.

²⁷ UU Kepemudaan Nomer 40 tahun 2009 menegaskan tentang batasan usia pemuda Indonesia yakni 15 sampai dengan 30 tahun. Sementara menurut standard WHO, 10-24 tahun), sedangkan menurut kriteria hukum, pemuda adalah mereka yang berusia antara 15-30 tahun.

²⁸ Mereka yang pada saat survei dilakukan berusia maksimal 21 tahun (dengan asumsi 5 tahun yang lalu masih berusia 16 tahun dan belum memiliki hak pilih).

²⁹ Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan rendah adalah pendidikan tingkat dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Bagan 2.
Tingkat Pendidikan dan Penghasilan Responden Kota Yogyakarta

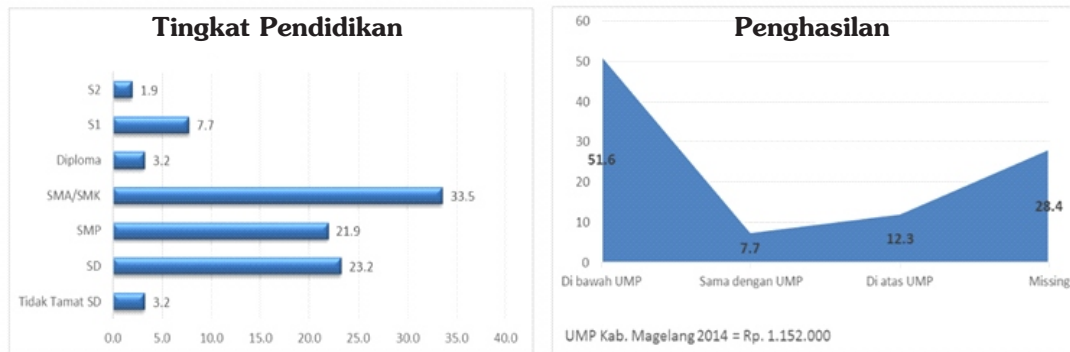


Sedangkan di Kabupaten Magelang, berdasarkan data yang masuk (155 kuesioner), responden di Kabupaten Magelang mencakup penduduk laki-laki maupun perempuan, dengan beragam status sosial ekonomi. Berdasarkan jenis kelamin, 56,1% responden atau sejumlah 87 orang berjenis kelamin perempuan, dan 65 orang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan menurut kelompok sasaran, responden terdiri dari 33 responden dari kelompok perempuan, 36 responden dari kelompok buruh, 41 responden dari kelompok difabel dan 45 responden dari kelompok umum (perempuan maupun laki-laki diluar kelompok sasaran). Dari hasil tabulasi silang antara jenis kelamin kelompok sasaran, dapat teridentifikasi bahwa dari 36 orang kelompok buruh, yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 18 orang, sehingga sama jumlahnya dengan jumlah buruh perempuan. Untuk kelompok difabel, dari 41 orang difabel, 75,6% diantaranya adalah laki-laki, sedangkan 24,4% adalah difabel perempuan.

Sedangkan dari aspek pendidikan, sebagian responden (33,5%) mempunyai pendidikan SMA/SMK, dan 45,1% atau 70 orang berpendidikan dasar SD dan/atau SMP. Dari status ekonomi responden, 51,6% dari 155 responden berpenghasilan di bawah UMP Kab. Magelang. Dengan besaran UMP Kab. Magelang yaitu Rp. 1.152.000,- maka dapat menjadi indikasi bahwa sebagian besar responden masuk dalam kategori miskin atau mendekati miskin. Dan jika dikaitkan dengan jenis pekerjaan, maka ada 45 orang responden yang bekerja sebagai buruh, baik buruh perusahaan/pabrik maupun buruh non perusahaan.

Dari 80 responden yang berpenghasilan di bawah UMP, hampir semuanya berasal dari 3 kelompok sasaran. Untuk kelompok perempuan, 20 dari 23 orang berpenghasilan di bawah UMP. Sedangkan untuk kelompok buruh, 22 dari 30 responden berpenghasilan di bawah UMP, dan untuk kelompok difabel 27 dari 28 orang berpenghasilan di bawah UMP. Data ini dapat menjadi indikasi bahwa pada umumnya kelompok sasaran masih mempunyai kendala dalam pemenuhan kesejahteraan hidupnya.

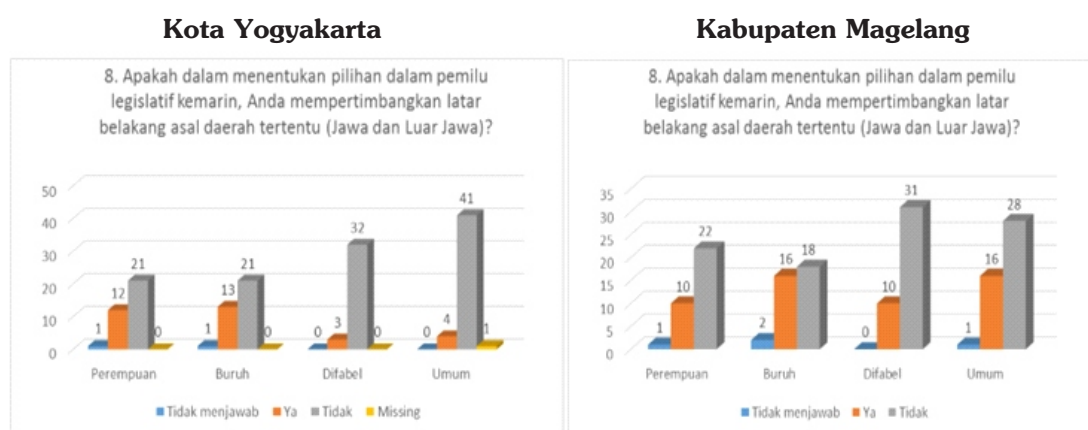
Bagan 3.
Tingkat Pendidikan dan Penghasilan Responden Kab. Magelang



Perilaku Memilih, Isu Pembangunan dan Tautan Politik di Kelompok Sasaran

Survei ini menunjukkan kecenderungan perilaku memilih responden di kedua wilayah menuju ke arah yang rasional, meski dengan kadar yang berbeda. Di Yogyakarta terdapat kecenderungan munculnya rasionalitas masyarakat dalam menentukan pilihan. Ini ditunjukkan oleh rendahnya skor dalam beberapa indikator yang terkait dengan pola perilaku sosiologis, yakni agama, suku, dan daerah asal calon serta pengaruh keluarga. Responden juga menunjukkan kecenderungan untuk memilih kandidat berdasarkan visi, misi maupun ideologi partai, ketimbang kedekatan personal.

Bagan 4.
Perilaku Memilih Responden Berdasarkan Asal Daerah Caleg



Responden di semua kelompok sasaran juga tidak lagi menjatuhkan pilihan pada saat pemilu legislatif kemarin berdasarkan pilihan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya kemandirian responden dalam menentukan pilihan, khususnya untuk kelompok perempuan. Dalam hal ini, bahkan di kelompok perempuan, mereka tidak lagi memilih berdasarkan pilihan keluarga. Kondisi ini bisa menjadi indikasi munculnya kesadaran politik di kelompok perempuan.

Bagan 5.

Perilaku Memilih Responden Berdasarkan Pilihan Keluarga

Kota Yogyakarta



Kabupaten Magelang

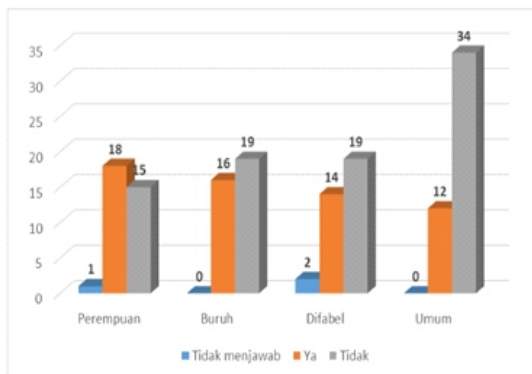


Lantas, apa yang membuat responden menentukan pilihan politiknya. Nampaknya, faktor-faktor yang bersifat rasional cenderung lebih menentukan sikap pemilih. Responden lebih lebih mempertimbangkan apakah kinerja partai atau anggota legislatif pada periode terdahulu menguntungkan dirinya secara ekonomi (bersifat retrospektif), dan/atau menilai apakah kinerja partai serta anggota legislatif dalam 5 tahun ke depan akan menguntungkan dirinya secara ekonomi atau tidak (bersifat prospektif).

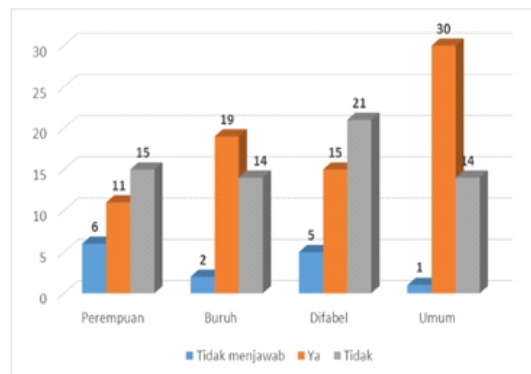
Bagan 6

Perilaku Memilih Responden Berdasarkan Penilaian Terhadap Kinerja Dewan

Kota Yogyakarta



Kabupaten Magelang



Temuan ini menarik, karena pendekatan pilihan rasional mengasumsikan bahwa para pemilih mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang diajukan dan mampu menilai isu-isu tersebut. Sementara jika dilihat dari tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden, mayoritas berpendidikan rendah (sekitar 44% berpendidikan SD dan SMP, atau bahkan tidak sekolah dan tidak tamat SD/SMP). Artinya, dapat dikatakan bahwa pemilih di Kota Yogyakarta secara umum (tidak hanya terbatas di kalangan berpendidikan tinggi) merupakan pemilih yang cerdas dan kritis.

Untuk kelompok difabel di Kota Yogyakarta misalnya, pertimbangan kinerja dewan nampaknya cukup menjadi acuan bagi pemilih di kelompok ini untuk menentukan pilihan. Responden kelompok difabel yang mempertimbangkan kinerja Dewan dalam memilih jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah responden untuk kelompok umum.

Temuan di Kabupaten Magelang pun menunjukkan kecenderungan serupa. Kelompok sasaran cenderung menunjukkan pergeseran ke arah perilaku politik yang lebih rasional, ketimbang yang sosiologis maupun psikologis. Meskipun, jika dibandingkan dengan responden Kota Yogyakarta, kecenderungan pergeseran rasionalitas politik responden di Kabupaten Magelang lebih rendah.

Perbedaan ini boleh jadi terkait dengan karakter wilayah antara kedua wilayah penelitian. Di Kota Yogyakarta, yang merupakan wilayah perkotaan, arus informasi, baik dari berbagai media (televisi, surat kabar, radio, dan lain-lain) relatif lebih terbuka untuk semua kalangan. Selain itu, karakter responden di wilayah Kabupaten Magelang, yang sebagian besar tinggal di wilayah pedesaan, juga mempengaruhi kultur politik di wilayah tersebut.

Peningkatan rasionalitas pemilih di kedua wilayah adalah indikasi telah tumbuhnya pendidikan politik masyarakat, baik yang dilakukan oleh partai politik, politisi, atau tokoh serta organisasi masyarakat setempat. Dengan semakin meningkatnya rasionalitas pemilih, politisi dan partai politik perlu lebih kreatif dan inovatif dalam cara kampanye dan penyusunan program, sehingga lebih dapat diterima oleh masyarakat. Sementara itu, politisi saat ini duduk di kursi legislatif perlu melakukan perbaikan kinerja untuk dapat menjaga dukungan masyarakat dalam pemilu-pemilu mendatang.

Perbaikan kinerja itu mutlak perlu dilakukan dalam isu-isu pembangunan yang menyedot perhatian masyarakat sebagaimana ditunjukkan oleh hasil survei ini. Data survei menunjukkan bahwa pendidikan dan pelayanan kesehatan masih menjadi “*trending issues*” di masyarakat. Responden masih mengeluhkan sulitnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan saat ini. Di kalangan masyarakat difabel, sistem pendidikan yang inklusif adalah kebutuhan utama.

Isu kesejahteraan dan jaminan sosial juga masih menjadi perhatian responden di dua wilayah ini. Karakter responden yang sebagian besar berpenghasilan dibawah UMP nampaknya ikut andil dalam menyumbang besarnya perhatian responden terhadap pentingnya peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial untuk masyarakat, khususnya di kelompok sasaran.

Isu lain yang dirasakan responden di dua wilayah adalah upah dan aturan perburuhan. Lagi-lagi, pekerjaan dan tingkat penghasilan responden, diduga turut mempengaruhi munculnya isu upah dan aturan perburuhan ini dalam satu dari lima isu pembangunan yang penting bagi responden. Pengaturan tenaga alih daya (*out sourcing*), yang menyedot perhatian responden menjadikannya isu penting di sektor upah dan aturan perburuhan. Di Kota Yogyakarta, isu upah dan aturan perburuhan menempati urutan kelima, sedangkan di Kabupaten Magelang berada di rangking keempat.

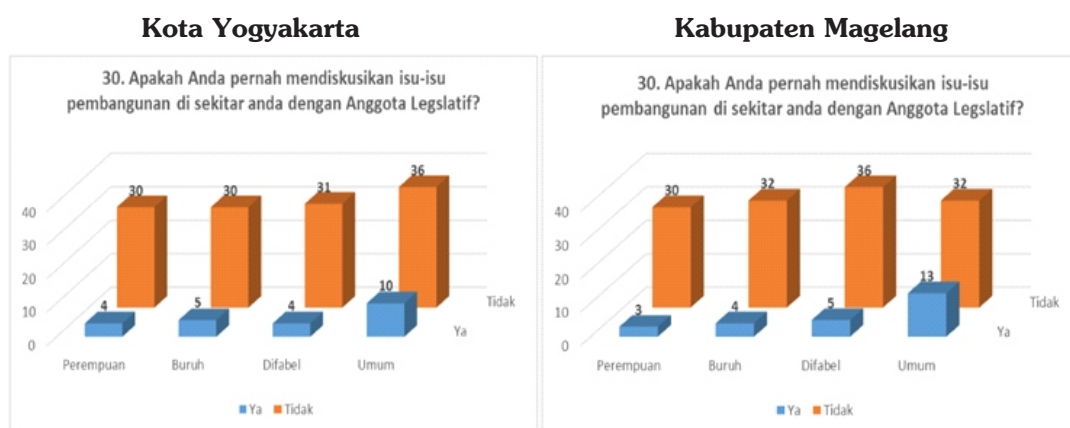
Sektor pembangunan lain yang berbeda rangking maupun isunya bagi responden di dua daerah ini adalah transportasi publik dan pertanian. Di Kota Yogyakarta, transportasi publik ada di rangking keempat, sedangkan di Kabupaten Magelang isu terkait sektor pertanian ada di peringkat kelima. Perbedaan ini sangat terkait dengan perbedaan karakter wilayah. Magelang lebih dominan daerah pedesaan, sedangkan Yogyakarta lebih dominan menunjukkan karakter wilayah perkotaan.

Temuan-temuan ini menegaskan bahwa persoalan dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masih perlu memperoleh perhatian serius dari para politisi. Diperlukan upaya berkelanjutan dari politisi, partai politik dan segenap pemangku kepentingan terkait untuk menjadikan isu ini sebagai prioritas dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dirancang. Rasionalitas perilaku politik masyarakat perlu dijawab dengan penguatan kinerja politisi, agar komitmen dan kesadaran bersama kedua belah pihak dalam menjawab isu-isu pembangunan dalam masyarakat.

Temuan lain yang juga memerlukan perhatian serius dari segenap pemangku-kepentingan adalah data terkait tautan politik (*political linkage*) antara politisi dengan masyarakat. Pertama, di kedua wilayah, ada kecenderungan kuat keterputusan *linkage* antara politisi dengan masyarakat. Hal ini tampak dari mayoritas responden yang bahkan tidak pernah mendiskusikan isu-isu atau masalah pembangunan disekitar mereka kepada anggota legislatif. Keterkaitan masyarakat dengan isu-isu pembangunan justru lebih banyak menjadi tanggungan Ketua RT/RW, organisasi masyarakat setempat, Pemerintah Desa/Kelurahan, maupun tokoh masyarakat.

Bagan 7.

Frekuensi Diskusi Pembangunan Antara Responden dengan Anggota Legislatif



Kondisi tersebut merata di seluruh kelompok sasaran. Baik di Kota Yogyakarta maupun Kabupaten Magelang, kelompok difabel menunjukkan keterputusan tautan antara responden dengan Anggota Legislatif terkait isu-isu pembangunan yang ada di wilayah tersebut. Hanya 9 orang dari 76 responden kelompok difabel di kedua wilayah pernah mendiskusikan isu-isu pembangunan dengan politisi.

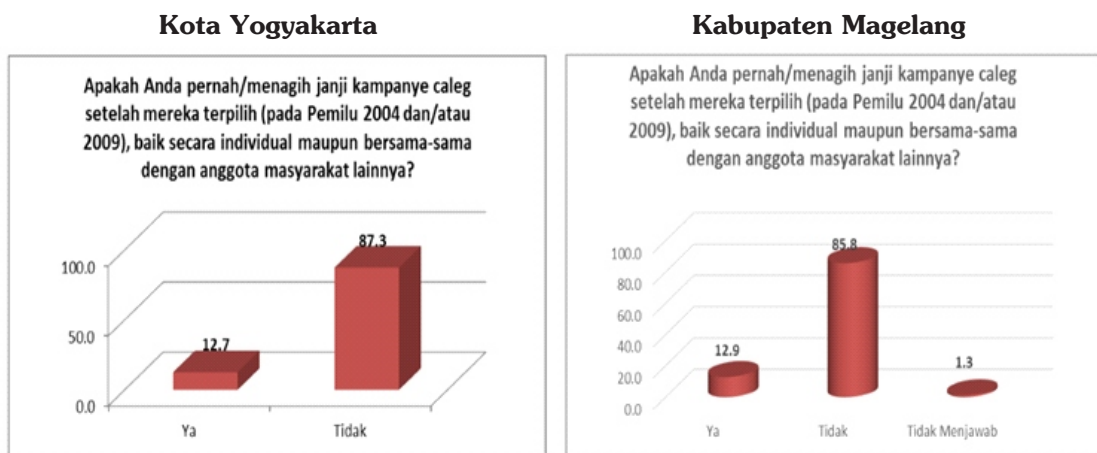
Kalaupun ada responden yang pernah mendiskusikan masalah pembangunan dengan anggota legislatif, itu mereka lakukan secara personal dengan anggota legislatif tersebut ketimbang dengan partai politik. Artinya, pola *linkage* antara masyarakat dengan politisi condong masuk dalam kategori *linkage* karismatik, dimana relasi antara politisi dengan konstituen dibangun berdasarkan kapasitas personal dan karisma personal.

Kedua, temuan tersebut juga mengindikasikan rendahnya pola *policy responsive linkage* dari partai politik. Padahal, pola ini sangat terkait dengan fungsi partai sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Dengan demikian, temuan ini perlu menjadi catatan bagi partai agar dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan partai dalam menyalurkan kepentingan konstituen. Jika tidak, maka masyarakat tidak akan pernah menganggap parpol dan politisi sebagai bagian penting dalam upaya pemenuhan kepentingan mereka.

Lebih dari 85% menyatakan bahwa mereka tidak pernah menagih janji kampanye caleg setelah mereka terpilih. Di satu sisi, ini mungkin kabar gembira bagi caleg maupun partai politik, karena semanis apapun rayuan saat kampanye kepada konstituen, mayoritas masyarakat akan dengan cepat melupakan dan tidak menagih janji tersebut. Tapi di sisi lain, ada dua makna penting yang perlu diperhatikan dalam menyoroti temuan ini. Makna pertama adalah ironi, sebab masyarakat tak merasa butuh menagih janji dari para politisi dan parpol. Ini boleh jadi adalah bagian dari rasionalitas lain dari masyarakat. Usai pemilu, masyarakat kembali pada urusan prioritas untuk memenuhi kesejahteraan mereka sendiri, tanpa perlu mengaitkan dengan apapun yang pernah dijanjikan oleh calon pada saat kampanye.

Bagan 8.

Frekuensi Responden Menagih Janji Kampanye Caleg setelah Terpilih



Makna kedua, temuan ini mempertegas absennya rakyat dalam proses demokrasi paska pemilu. Masyarakat hanya hadir pada saat hari-H pencoblosan. Setelah pelantikan, maka tidak ada kepentingan yang mengikat politisi kepada masyarakat pemilih, dan sebaliknya. Artinya, demokrasi yang seringkali dimaknai sebagai “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” baru terpenuhi dari sisi dari rakyat-nya, sementara mekanisme pengawasan dan partisipasi dalam jalannya pemerintahan (bagian penting dalam “oleh rakyat dan untuk rakyat”), belum tercipta. Demokrasi baru sepertiga jalan berhasil dilalui.

Makna ketiga, temuan ini memperkuat ketidakhadiran pola keterkaitan antara politisi dengan masyarakat. Paska terpilih, anggota legislatif maupun partai politik dapat melakukan apapun dengan pengawasan minim dari masyarakat. Dan pada saat yang sama, masyarakat dapat mandiri dan menyelesaikan persoalan publik yang mereka hadapi, bahkan tanpa melibatkan para politisi. Ini tantangan besar bagi pola pelembagaan partai dan pendidikan politik bagi masyarakat.

Temuan-temuan tersebut perlu dicermati, sebagai bahan evaluasi bagi semua pemangku kepentingan: Politisi, Partai Politik, Pemerintah, maupun masyarakat sendiri untuk menata proses demokratisasi yang sedang berjalan ini. Keterlibatan dan ketersambungan masyarakat dengan politisi, partai politik dan pemerintah menjadi suatu keniscayaan yang perlu dibangun bersama. Hanya dengan cara inilah, bangunan demokrasi di Indonesia dapat tumbuh semakin kokoh dan bermanfaat, bukan hanya untuk penguasa, namun dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, khususnya kelompok masyarakat yang rentan dan termarginalkan.

Catatan Penutup



Hasil survei sederhana yang dilakukan JPP ini mungkin menghasilkan temuan yang barangkali tidaklah baru, khususnya terkait keterputusan tautan politik ini. Namun, temuan ini sebenarnya memperkuat sekaligus menyajikan bukti bahwa ketiadaan tautan politik antara masyarakat dengan politisi, khususnya di lembaga legislatif adalah realitas politik saat ini. Di satu sisi, kecenderungan ditemukan rasionalitas pemilih yang mulai menguat di semua kelompok sasaran. Hanya saja, belum diimbangi dengan penguatan pola keterkaitan antara politisi dengan masyarakat. Ini lah yang kemudian menjadi PR bersama dalam upaya untuk meningkatkan pendidikan politik untuk kelompok sasaran, dan lebih khusus lagi justru peningkatan pendidikan politik bagi politisi.

Selain itu, jika demokrasi yang menyejahterakan menjadi tujuan, hasil survei ini memperkuat perlunya perjuangan dan advokasi untuk mencapai tujuan itu, khususnya di kelompok sasaran. Harus diakui, demokrasi, bagi sebagian besar masyarakat adalah sekedar memberikan suaranya melalui pemilihan umum. Namun, untuk mencapai tujuan kesejahteraan, diperlukan kesediaan dan komitmen untuk mengawal proses politik dan pembuatan kebijakan paska Pemilu, baik di lembaga legislatif maupun di birokrasi pemerintahan.

Untuk itu, diperlukan studi yang berkelanjutan untuk dapat menemukan metode dan instrumen yang tepat untuk memperkuat rasionalitas pemilih, sekaligus memperkuat komitmen politisi untuk menyelesaikan persoalan pembangunan yang dirasakan kelompok sasaran. Dan pada saat yang sama, perlu upaya cerdas untuk membangun komitmen dari kelompok sasaran, aktivis, akademisi, politisi dan birokrasi, agar tercipta mekanisme cek dan ricek antar pemangku-kepentingan, untuk mengawal isu-isu pembangunan yang menjadi perhatian kelompok sasaran.

Daftar Pustaka

- Alfian dan Syamsudin, Nazaruddin (ed), 1991, *Profil Budaya Politik Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Almond, Gabriel A. and Sidney Verba, 1984, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, Princeton University Press, Princeton.
- Buelens, Jo dan Deschouwer 2002, *The Belgian Greens in Government*.
- Clark, E. V 2003, *First Language Acquisition*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Djarwanto, 1994, *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, Liberty, Yogyakarta.
- E.G. Carmines and R. Huckfeldt, 1996, *Political Behavior: An Overview*,” in R.E. Goodin and H.-D. Klingemann (eds.), *A New Handbook of Political Science*, Oxford University Press, Oxford.
- Gaffar, A 1992, *Javanese Voters: A Case Study Of Election Under A Hegemonic Party Sistem*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harrop M and Miller, W 1987 *Elections and voters : a comparative introduction*, Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Macmillan Education.
- Introduction to Quantitative Research*, 2010, dalam http://www.sagepub.com/upm-data/36869_muijs.pdf, diakses pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 pukul 09:54 WIB.
- Kitschelt, H, 2007, *Growth And Persistence Of The Radical Right In Postindustrial Democracies*, Bonn, Friedrich Ebert Stiftung.
- Kitschelt., H, 2000. *Linkages Between Citizens And Politicians In Democratic Politics*. *Comparative Political Studies* 33.
- Nursal, A 2004, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*, Gramedia, Jakarta.
- Poguntke, T 2002, *Green Parties in National Governments: From Protest to Acquiescence?*, Routledge.
- Poguntke, T and Scarrow, S 1996, *The Politics of Anti-Party Sentiment*.
- Rasyid, 2000, *Makna Pemerintahan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Sastroatmodjo, S 1995, *Perilaku Politik*, IKIP Press, Semarang.
- Stikes, Jane, 2007, *How To Do Media And Cultural Studies: Panduan Untuk Melaksanakan Penelitian dalam Kajian Media dan Budaya*, Bentang Pustaka, Yogyakarta.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim 2001, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.

Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Surbakti, R 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Pustaka Utama, Jakarta.

Törnquist, O 2009, *Rethinking Popular Representation*, Palgrave Macmillan.

Internet

What is Survey, dalam <<http://www.amstat.org/sections/srms/pamphlet.pdf>> diakses pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 pukul 10:41 WIB.

Dalam <http://kpu-jogjakota.go.id/download/arsip/gRAFIK%20PERSENTASE%20YG%20MENGUNAKAN%20HAK%20PILIH%20DAN%20TIDAK.pdf> diakses pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 pukul 9:13 WIB.

Partisipasi Kota Yogya Terendah, dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/node/279201> diakses pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 pukul 9:21 WIB.

Wardoyo, Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Magelang dalam <http://jogja.tribunnews.com/2014/04/22/partisipasi-pemilu-di-kabupaten-magelang-meningkat/>, diakses pada 2 September 2014, pukul 12.50 WIB.

Farid B. Siswanto, Humas KPU DIY. Dalam *Partisipasi Kota Yogya Terendah*, dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/node/279201> diakses pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 pukul 9:29 WIB.

Dalam <http://kabarkota.com/berita-anggota-dprd-kota-yogyakarta-terpilih-periode-20142019.html> diakses pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 pukul 10:10 WIB.

Fatchiati, Nurul “Geliat Santri Kota di Wilayah Abangan” dalam *Kompas*, Jakarta: Edisi 13 Maret 2009.

Asgart, Sofian Munawar “Perilaku Pemilih di Kota Yogyakarta: Fenomena Pemilu 2004 dan 2009” diakses dari

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31811695/Perilaku_Pemilih_di_Kota_Yogyakarta_sofian_asgartlibre.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1409210326&Signature=xj1o2iHwSgpgFda%2FqCOXARF%2Faxl%3D
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31811695/Perilaku_Pemilih_di_Kota_Yogyakarta_sofian_asgart-libre.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1409210326&Signature=xj1o2iHwSgpgFda%2FqCOXARF%2Faxl%3D pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 pukul 11:16 WIB.

Ariffudin, Ketua KPU Kabupaten Magelang, dalam <http://kpukabmagelang.com/hasil-pileg-2014>, diakses pada 2 September 2014, pukul 15.00 WIB.